KOMINFO | Kedaulatan Rakyat | ANTARA KANTOR BERITA INDONESIA

DERAP NUSANTARA

SELASA PAHING, 22 OKTOBER 2024 (18 BAKDAMULUD 1958) | HALAMAN 8

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/rwa

PEMBANGUNAN KELOK 18 JJLS: Foto udara pembangunan jalan kelok 18 di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Kretek, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (7/8/2024). Jalan kelok 18 di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang akan menghubungkan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul merupakan proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat dengan biaya Rp254 miliar tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2025.

Komisi Nasional Disabilitas: Peparnas Angkat Kesetaraan Hak Difabel

SOLO - Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyebut Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo 2024 mampu mengangkat kesetaraan hak disabilitas di Indonesia.

Komisioner KND Jonna Aman Damanik di Solo, Jawa Tengah, Sabtu mengatakan Peparnas bukan hanya ajang olahraga tetapi juga simbol kolaborasi mitra kerja untuk memastikan terselenggaranya acara dengan sukses dan inklusif.

Ia mengatakan mulai dari pembukaan hingga saat ini Peparnas berjalan lancar. Menurut dia, hal tersebut merupakan hasil kolaborasi banyak pihak. "Kami juga telah mengadakan rapat koordinasi dengan Panitia Besar Peparnas dua minggu sebelum acara. Ini adalah kerja sama yang luar biasa," katanya.

Ia mengatakan Peparnas kali ini mampu memberikan ruang yang adil dan inklusif bagi para atlet difabel untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam 20 cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Rima Ferdianto mengatakan Peparnas kali ini merupakan momen penting untuk regenerasi atlet muda difabel yang berbakat. "Sukses regenerasi atlet muda benar-benar terlihat di event ini. Ini menjadi catatan penting untuk masa depan agar lebih banyak atlet baru dengan potensi besar yang bisa kami kembangkan," katanya.

Menurut dia, Peparnas memiliki nilai yang sama dengan Pekan Olahraga Nasional (PON). Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat tidak memandang sebelah mata pelaksanaan Peparnas. "Ini merupakan perhelatan yang sama pentingnya dalam meningkatkan kemampuan atlet disabilitas," katanya.

Ia mengatakan selama Peparnas yang berlangsung pada 6-13 Oktober penyelenggara telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap inklusivitas dengan menyediakan fasilitas ramah disabilitas, mulai dari transportasi dengan aksesibilitas khusus, jalur kursi roda di berbagai tempat, hingga pelatihan khusus bagi panitia dan relawan mengenai cara memberikan pelayanan inklusif. "Semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman positif bagi atlet, ofisial, dan pengunjung," katanya. **(ANTARA)**

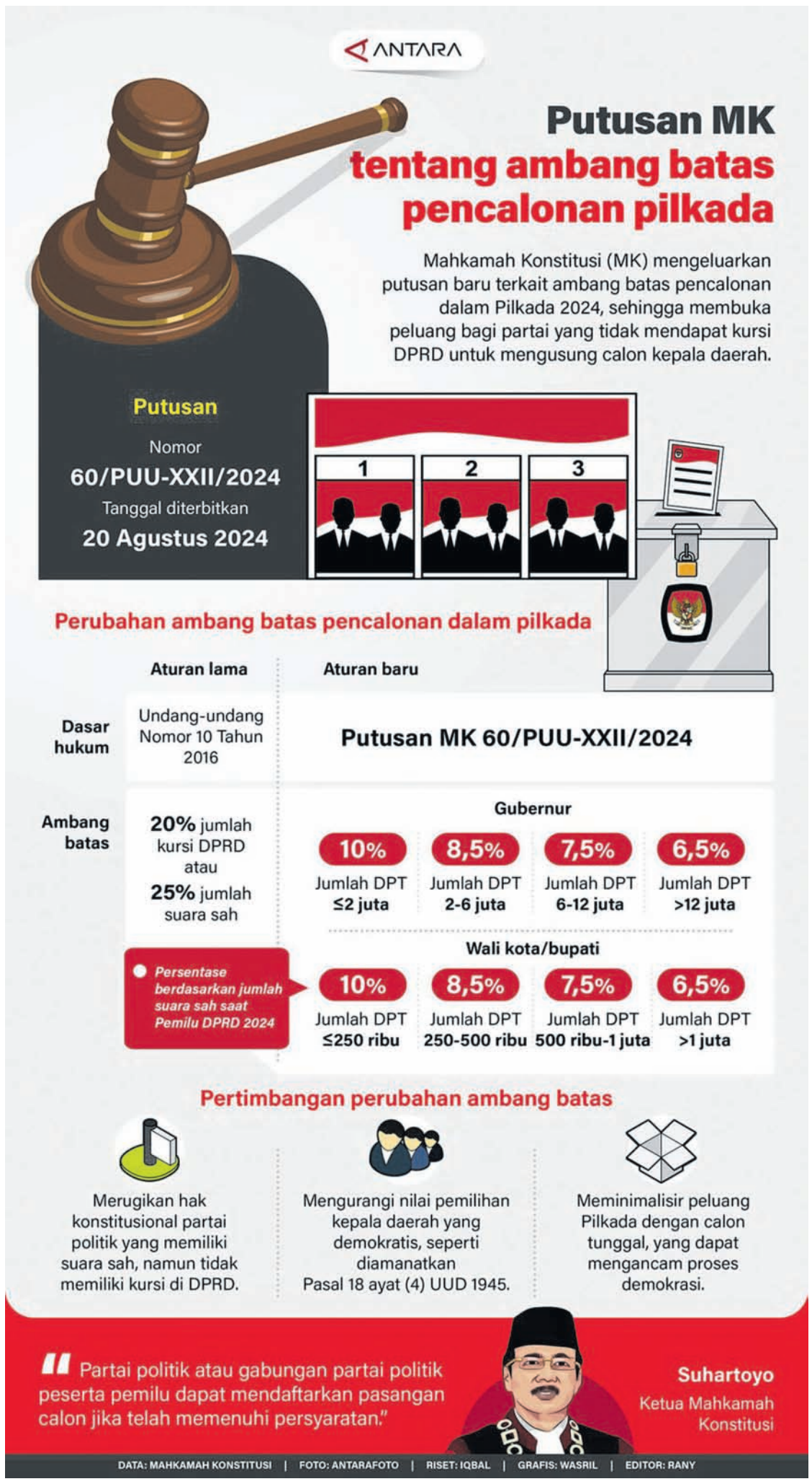

LPEM UI: Prabowo-Gibran Perlu Perkuat Penegakan Hukum Terkait Pajak

JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak.

"Kalau dilihat kan memang banyak kasus yang mana penegakan hukum masih cukup lemah, jadi tax collection (pemungutan pajak) juga masih rendah, jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu dikuatkan," kata Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan bahwa selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran pajak, seperti yang tertuang dalam Program Kerja Asta Cita ke-7 pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu misi yang tertuang dalam Asta Cita tersebut adalah reformasi tata kelola pemerintahan dengan mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah.

Riefky menuturkan bahwa meningkatkan pendapatan negara juga dapat dilakukan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor formal, sehingga bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak, terutama dari Pajak Penghasilan.

Ia mengatakan bahwa kini sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pekerja informal di sektor jasa maupun perdagangan. Hal tersebut mengurangi potensi kontribusi mereka terhadap pajak, apalagi di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini. "Sekarang daya beli kelas menengah menurun ini kan pasti potensi kontribusi pajaknya juga menurun, dan semakin besar penduduk yang bekerja di sektor informal juga potensi untuk mereka berkontribusi terhadap penerimaan fiskal juga semakin turun," jelasnya.

Selain itu, Riefky juga meminta pemerintah mendatang untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas sektor industri dan manufaktur agar dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara.

Ia menyampaikan bahwa mengenakan lebih banyak jenis pajak terhadap sektor-sektor tersebut justru bukanlah kunci untuk meningkatkan kontribusi mereka. "Kalaupun mau dinaikkan (penerimaan pajaknya), memang perlu langkah yang lebih konsekuen dan lebih gradual (bertahap) untuk tidak menimbulkan unintended consequences (konsekuensi yang tidak diinginkan) di perekonomian," ujarnya.

Sementara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara, Riefky mengatakan bahwa praktik pemisahan antara Kementerian Keuangan dan lembaga penerimaan telah dilakukan secara efektif di banyak negara. Meskipun begitu, ia menyoroti sejumlah tantangan bagi pemerintahan mendatang dalam melakukan praktik tersebut, salah satunya mempersiapkan transisi pemisahan kedua institusi tersebut.

"Yang mungkin juga menjadi isu adalah sinkronisasi fiskal dari sisi belanja dan penerimaan ini, kan dulu di bawah satu kementerian, lalu dipisah, nah ini mungkin perlu dipikirkan bagaimana nanti sinkronisasinya," imbuhnya.

Pendirian Badan Penerimaan Negara yang baru dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23 persen merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat (quick win) yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan anggaran pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak ekonomi. **(ANTARA)**

Dody Hanggodo Terpilih Sebagai Menteri Pekerjaan Umum

JAKARTA - Dody Hanggodo terpilih menjadi Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ir Dody Hanggodo MPE, Menteri Pekerjaan Umum," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu malam.

Berdasarkan pengumuman tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah nomenklatur menjadi dua kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dody Hanggodo merupakan salah satu dari 49 tokoh yang dipanggil oleh Presiden Prabowo di rumahnya di kawasan Kartanegara IV, Jakarta Selatan pada Senin (14/10). Mereka yang dipanggil untuk ditempatkan di posisi pos kementerian yang telah dipersiapkan Prabowo.

Para tokoh itu terdiri atas politisi, akademisi, hingga menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama menteri yang berada dalam kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt/pri

Presiden Prabowo Subianto (ketujuh kiri) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (keenam kiri) mengumumkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah nama menteri didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan kabinet merah putih 2024," kata Presiden Prabowo.

Adapun jumlah menteri dan kepala badan yang diumumkan mencapai 53 orang, sedangkan wakil menteri yang diumumkan berjumlah 56 orang. Pengumuman tersebut dilakukan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10). **(ANTARA)**

ARTIKEL

Masa Depan Pengembangan Energi Hijau di Indonesia

Oleh Sean Filo Muhamad

JAKARTA - Pemanfaatan energi hijau atau energi baru terbarukan kini telah menjadi tren di seluruh dunia. Indonesia pun sudah memulainya meski masih dalam skala relatif kecil.

Di negara maju seperti Islandia, energi baru terbarukan memasok hampir 100 persen produksi listrik, dengan rincian sekitar 73 persen berasal dari tenaga air dan 27 persen dari tenaga panas bumi, yang mampu menyalurkan konsumsi listrik sebesar 18.798 Gigawatt hour (GWh) pada 2015.

Sementara di wilayah Asia, China berkontribusi terhadap lebih dari 50 persen, dari 510 GW kapasitas energi baru terbarukan yang baru terpasang di seluruh dunia pada 2023. China juga memegang posisi dominan dalam produksi komponen fotovoltaik, turbin angin, dan baterai.

Di negara tetangga, Malaysia, diperkirakan bisa mencapai kapasitas energi baru terbarukan sebesar 18,2 persen pada tahun 2025 dan 36,4 persen pada tahun 2035. Hal tersebut berpotensi untuk diraih melalui dukungan 13,3 persen dari total kapasitas pembangkit listrik di negeri jiran tersebut, yang berasal dari energi baru terbarukan.

Indonesia sendiri bukan tanpa potensi untuk mengikuti jejak ketiga negara tersebut. Sebab, Presiden RI Joko Widodo dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI mengungkapkan Indonesia memiliki sebanyak lebih dari 3.600 GW potensi energi hijau, baik dari energi air, angin, Matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.

Pemerintah juga menyatakan keseriusannya dalam mengembangkan energi hijau tersebut. Sejak 2017, Pemerintah telah menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menetapkan target bauran energi melalui pemanfaatan berbagai sumber energi.

Selain itu, Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2017 yang menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mencapai target energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030, atau hingga 41 persen dengan dukungan internasional.

Upaya Konversi Energi

Dengan wilayah negara yang terletak di bawah Garis Khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan panas Matahari untuk dikonversi menjadi energi hijau.

Oleh sebab itu, dalam mengembangkan dan memanfaatkan energi hijau di Indonesia, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan inovasi, teknologi, dan penelitian yang dapat mendukung transisi energi di Indonesia, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan PLTS terapung yang bisa diletakkan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Pulau Sumatera yang memiliki potensi energi surya mencapai 48.000 terawatt hours (TWh) per tahun dengan potensi pemanfaatan PLTS terapung sebanyak 94,7 persen.

Kemudian, Pulau Jawa dan Kepulauan Sunda Kecil dengan 11.500 TWh dan potensi pemanfaatan 53,8 persen, Pulau Kalimantan dengan 29.400 TWh dan potensi pemanfaatan 97,3 persen, Pulau Sulawesi dengan 50.200 TWh dan potensi pemanfaatan mencapai 96,9 persen, serta Maluku dan Papua yang memiliki potensi energi surya sebanyak 51.200 TWh dengan potensi pemanfaatan PLTS terapung mencapai 99,7 persen.

Kiprah Indonesia dalam pemanfaatan energi hijau tersebut diawali dengan terciptanya PLTS terapung seluas 200 hektare di Waduk Cirata, Jawa Barat, yang telah diresmikan pada 2023. PLTS yang bernilai investasi sebesar Rp1,7 triliun tersebut memiliki kapasitas sebesar 192 Megawatt peak (MWp).

ANTARA FOTO/Fauzan/YU

Petugas melakukan perawatan panel surya di PLTS Terapung Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (16/3/2024).

Guna memaksimalkan potensi energi surya yang belum dimanfaatkan, Pemerintah juga mendorong pembangunan PLTS terapung di sejumlah wilayah dengan mengidentifikasi wilayah perairan yang berpotensi untuk dibangun PLTS terapung, membuat mekanisme lelang proyek pembangunan PLTS yang transparan, menyiapkan skema investasi untuk menarik minat investor, serta menyusun regulasi yang mendukung pembangunan PLTS terapung, termasuk skema pembiayaan dan kemudahan perizinan.

Tak hanya pengembangan PLTS terapung, Pemerintah juga melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM), penerapan teknologi energi hijau, dan proyek percontohan di berbagai desa di Indonesia hingga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti kerja sama dengan lembaga riset dari negara-negara maju untuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas riset. Berbagai upaya tersebut turut mengantarkan Indonesia, yang kini memiliki hampir 13 persen bauran energi baru terbarukan. Namun demikian, angka tersebut baru diperoleh dari pemanfaatan energi hijau yang hanya 0,3 persen dari potensi yang tersedia.

Ahli juga mengungkapkan penggunaan energi hijau sebesar 100 persen di masa yang akan datang juga memungkinkan, dengan tetap memperhatikan trilemma energi yaitu Energy Equity atau energi yang disediakan dapat diakses dan terjangkau oleh semua orang, Energy Security atau upaya penyediaan energi dengan tetap memperhatikan rantai pasok serta kemampuan memenuhi permintaan yang terus meningkat dengan infrastruktur yang andal, dan Environmental Sustainability atau pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan dan sumber energi rendah karbon lainnya serta peningkatan efisiensi energi (supply and demand).

Dengan terus meningkatnya dukungan kebijakan dan investasi serta kerja sama yang baik antara Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, pemanfaatan energi hijau di Indonesia akan terus meningkat, mendukung target nasional dan turut berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

Secara keseluruhan, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusan dalam memaksimalkan potensi energi hijau melalui berbagai kebijakan strategis, investasi, dan insentif yang dirancang untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, komitmen ini memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan sektor energi hijau di masa depan. **(ANTARA)**